



## Membangun pendidikan multikultural melalui pendekatan inklusi dalam pembelajaran sosiologi

**Septina Galih Pudyastuti\*, Yosafat Hermawan Trinugraha, Nurhadi, Saifuddin Zuhri**

Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

\*email Koresponden Penulis: [septina@staff.uns.ac.id](mailto:septina@staff.uns.ac.id)

### Info Artikel

#### Riwayat Artikel

**Diajukan:** 2023-06-25

**Diterima:** 2023-07-30

**Diterbitkan:** 2023-08-09



**Lisensi:** cc-by-sa

Copyright © 2023 Penulis

### ABSTRAK

*Peningkatan kompetensi sebagai unsur profesionalitas guru tercermin dalam pembelajaran. Panduan kurikulum Merdeka membahas pendekatan inklusi sebagai wujud pendidikan multikultural. Inklusi merupakan strategi membangun lingkungan pendidikan yang setara bagi subyek pendidikan dengan perbedaan latar belakang dan kondisi. Mewujudkan pembelajaran Sosiologi dengan pendekatan inklusi masih menjadi kendala bagi sebagian guru MGMP Sosiologi di Surakarta. Kegiatan pengabdian ini berjenis research and development yang bertujuan memberikan pemahaman pendekatan inklusi melalui kegiatan sosialisasi. Salah satunya difasilitasi RG Habitus Pendidikan Sosiologi Antropologi UNS dengan menghadirkan seorang praktisi dan para guru yang tergabung dalam MGMP Sosiologi Surakarta. Produk luaran berupa representasi video pembelajaran di SMA N 8 Surakarta yang ditunjuk sebagai percontohan sekolah pendidikan inklusi di Surakarta. Video tersebut sekaligus sebagai bahan refleksi bagi guru dalam pembelajaran Sosiologi.*

**Kata Kunci:** kurikulum merdeka; pendekatan inklusi; pembelajaran sosiologi

### Cara mensitasi artikel:

Pudyastuti, S. G., Trinugraha, Y. H., Nurhadi, & Zuhri, S. (2023). Membangun pendidikan multikultural melalui pendekatan inklusi dalam pembelajaran sosiologi. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 4(2), 323-331. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v4i2.20351>

## PENDAHULUAN

Pengembangan Kurikulum Merdeka sebagai upaya pemulihan pembelajaran Kurikulum 2013. Menurut Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran, institusi pendidikan harus membuat konsep diferensiasi kurikulum yang sesuai dengan kondisi institusi, potensi daerah, dan peserta didik (Priowuntato et al., 2023). Kurikulum Merdeka memiliki beberapa indikator seperti pengembangan keterampilan dasar, pembelajaran diferensiasi, profil siswa Pancasila, dan kesesuaian dengan konteks muatan lokal. Kebijakan tersebut menjadi pijakan penerapan pendidikan multikultural yang terintegrasi dalam Kurikulum Merdeka. Upaya penanaman nilai multikultural dilakukan melalui pembelajaran demokratis serta menyatukan dimensi budaya lokal dan

nasional. Hal ini sebagai bentuk keterbukaan terhadap keberagaman latar belakang dan karakteristik serta mengurangi atau menghapuskan stigma negatif.

Hak yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan berkualitas dijamin dalam Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 (Kemdikbud, 2022). Kebijakan tersebut diberlakukan bagi seluruh anak usia sekolah. Setiap anak berhak mendapatkan perlakuan sama, pendidikan yang layak dan bermutu tanpa terkecuali (Wardhani, 2018). Konsep pendidikan untuk semua (*education for all*) yang ditetapkan oleh UNESCO adalah pendidikan yang ramah untuk semua dan menjangkau semua orang tanpa terkecuali untuk memaksimalkan manfaat pendidikan (Ardhika & Syaifudin, 2023). Kemajuan pendidikan suatu bangsa dilihat dari keberjalanan proses pendidikan itu berlangsung. Penyelenggaraan pada masing-masing satuan pendidikan berpedoman pada arahan kebijakan yang berlaku. Salah satunya panduan kurikulum Merdeka Belajar mengenai pendekatan inklusi sebagai wujud pendidikan multikultural. Subyek pendidikan dengan latar belakang dan kondisi yang berbeda-beda, meliputi karakteristik, kondisi fisik, kepribadian, status, suku, budaya, dan lain sebagainya merupakan modal utama dalam menciptakan lingkungan yang terbuka sebagai implementasi pendidikan multikultural. Pola pikir ini kemudian berkembang dan dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah. Pendidikan inklusi adalah sistem pendidikan yang memberikan kesempatan bagi semua siswa untuk mendapatkan pendidikan yang layak (Tanjung et al., 2022). Kebijakan pendidikan inklusi mengacu kepada peraturan perundang-undangan pasal 28 H Ayat 2 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Pendekatan inklusi menjadi agenda bagi *stakeholder* untuk memastikan bahwa setiap anak menerima hak sosial dan pendidikan yang berkualitas di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan di satuan pendidikan regular. Hal mengenai pendidikan khusus didefinisikan dalam Bab IV Pasal 5 Ayat 2, 3, 4 dan 32 dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai pendidikan yang ditujukan untuk siswa yang mengalami kelainan (fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial) dan diselenggarakan secara inklusif, baik pada tingkat dasar maupun menengah (Pudyastuti, 2023b). Pendekatan inklusi adalah modal utama seorang guru dalam menciptakan iklim pembelajaran demokratis yang memungkinkan mereka memahami dan mengeksplorasi potensi dan sifat unik setiap siswa (Widyan et al., 2014). Pendidik yang menerapkan pendekatan inklusi diharapkan mampu menerima peserta didik dengan berbagai kelemahan, kelebihan, serta berusaha secara profesional untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki agar memiliki keberfungsian sosial. Guru menjadi salah satu *role model* utama bagi peserta didik dalam membangun sikap toleransi akan keberagaman dan bukan melihat perbedaan sebagai bentuk diskriminasi.

Kegiatan penelitian dari Rahman Tanjung (2022) mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusi pada Lembaga Pendidikan Islam masih dipahami sama seperti sekolah biasa dan menerapkan layanan pembelajaran dengan “model ketuntasan

hasil bersama” sehingga *output* yang diperoleh kurang maksimal, terutama bagi subyek pendidikan dengan kemampuan mental rendah. Sedangkan, penelitian Suwartini (2018) menyimpulkan bahwa pendidikan inklusi dikatakan berhasil apabila sekolah mampu memfasilitasi kebutuhan peserta didik melalui evaluasi serta penyediaan sarana dan prasarana berbasis Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Studi pembelajaran *contextual teaching and learning* mengkaji kualitas pendidikan di sekolah dasar (SD) inklusi bergantung dari kualitas guru saat melaksanakan proses pembelajaran, penguasaan materi, metode, alat peraga, memotivasi siswa, serta menumbuhkan kondisi belajar yang efektif (Mansur, 2022).

Beberapa hasil penelitian mayoritas masih dilakukan di sekolah dengan sistem inklusi dan sebatas pemahaman bahwa inklusi hanya mempelajari mengenai subyek pendidikan dengan kebutuhan khusus. Melalui kegiatan yang peneliti lakukan, konsep inklusi dikaji dalam pendekatan psikologis dan sosiologis melalui proses pembelajaran. Inklusi dalam kajian sosiologis merupakan proses membangun hubungan sosial dengan terbuka akan segala bentuk keberagaman (Azis et al., 2021). Sedangkan dalam perspektif psikologi, pendekatan inklusi berarti memberikan pendidikan kepada siswa dengan kelainan atau potensi kecerdasan dan bakat istimewa sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka (Ita, 2019). Pengembangan program pembangunan pendidikan di Indonesia bergantung pada kompetensi guru, yang berfungsi sebagai katalisator perubahan bagi siswa. Guru profesional harus melakukan pengelolaan kelas yang efektif dan menyenangkan (Pudyastuti, 2023a). Implementasi kurikulum Merdeka berpengaruh dalam inovasi pendekatan pembelajaran. Salah satunya mengenai pendekatan inklusi dalam memfasilitasi keberagaman peserta didik. Setiap capaian pembelajaran mulai dari kegiatan awal, inti, dan penutup mencantumkan indikator penerapan pendekatan inklusi. Pendekatan inklusi dinilai penting sebagai ukuran kebermaknaan serta ketuntasan belajar peserta didik baik melalui hasil dan proses. Pendidikan harus memenuhi karakteristik kebutuhan anak, termasuk kebutuhan fisik, emosi, sosial, budaya, agama, dan bahasa.

Mewujudkan pembelajaran Sosiologi dengan pendekatan inklusi masih menjadi kendala bagi sebagian guru MGMP Sosiologi di Surakarta. Mayoritas dari tenaga pendidik memahami inklusi sebagai keterbatasan subyek pendidikan dalam segi psikologis dan hanya berfokus pada penyampaian substansi materi pelajaran kepada peserta didik. Berdasarkan kajian beberapa kebijakan serta literatur yang telah dilakukan, maka dirasa perlu melakukan kegiatan pengabdian. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sekaligus sebagai bahan evaluasi penerapan pendekatan inklusi dalam kegiatan pembelajaran Sosiologi. Grup riset Habitus Pendidikan Sosiologi FKIP UNS bekerjasama dengan MGMP Sosiologi di Surakarta akan melakukan pengabdian berupa sosialisasi mengenai penerapan pendidikan inklusi dalam pembelajaran Sosiologi.

## METODE

Pengabdian Grup Riset Habitus dilakukan dengan pendekatan *Participatory Action Research (PAR)* yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.



Pendekatan *PAR* melihat masyarakat merupakan agen utama perubahan, sedangkan peneliti pelaksana pengabdian hanya sebagai fasilitator dalam proses perubahan tersebut (Afandi et al., 2022). Mitra utama kegiatan pengabdian melibatkan rekan guru yang tergabung dalam MGMP Sosiologi Surakarta. Pemberdayaan melalui sosialisasi memberikan pengetahuan, pemahaman, serta perubahan pembelajaran Sosiologi inklusif sebagai perwujudan pendidikan multikultural.

Pengabdian dilaksanakan pada 13 Juni 2023 berlokasi di SMA Negeri 2 Surakarta dengan alamat Jalan Monginsidi No. 40 Surakarta. Beberapa persiapan telah dilakukan sebelum terlaksananya kegiatan sosialisasi tersebut. Mulai dari koordinasi, penggalan data, serta persiapan akhir dilakukan di tempat berbeda. Adapun tahap pertama dimulai dengan koordinasi dan diskusi bersama pengurus MGMP Sosiologi Surakarta. Dalam hal ini melibatkan Ketua, Sekretaris, serta perwakilan guru bidang studi Sosiologi di Surakarta. Tujuan dari kegiatan ini mengidentifikasi permasalahan yang dialami guru selama praktek pembelajaran. Diskusi dimaksudkan juga untuk menyamakan persepsi mengenai solusi sekaligus merancang kegiatan bersama. Selanjutnya, rancangan kegiatan disusun menjadi proposal kegiatan pengabdian masyarakat. Tahapan selanjutnya meliputi kegiatan sosialisasi dengan menghadirkan peserta dari seluruh guru yang tergabung dalam MGMP Sosiologi di Surakarta. Sosialisasi yang dilaksanakan tim pengabdian dihadiri oleh 37 guru Sosiologi.

Tema dari kegiatan sosialisasi ini mengenai penerapan pendekatan inklusi dalam praktek pembelajaran Sosiologi. Narasumber terdiri dari pihak internal dan eksternal. Narasumber internal berasal dari RG Habitus Pendidikan Sosiologi Antropologi di UNS, sedangkan pihak eksternal melibatkan psikologi yang berasal dari PLDPI (Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusi) Surakarta. Pemaparan materi disampaikan kurang lebih 30 menit. Materi yang disampaikan narasumber terbagi atas tiga kajian, meliputi: 1) kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusi sebagai implementasi kurikulum merdeka, 2) kajian psikologi dalam pendidikan inklusi, serta 3) kajian sosiologi dalam pendidikan inklusi. Kegiatan terakhir dari pengabdian dilakukan dengan pembuatan video praktek pembelajaran Sosiologi yang terwakili oleh guru di SMA N 8 Surakarta. Lokasi tersebut dipilih dikarenakan SMA N 8 Surakarta merupakan salah satu institusi pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai sekolah inklusi. Video akan dipublikasi serta *menjadi role model* atau representasi bagi guru Sosiologi di sekolah lain.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan oleh RG Habitus memperoleh banyak informasi dan gambaran mengenai beberapa permasalahan yang dihadapi oleh guru. Implementasi Kurikulum Merdeka salah satunya berpengaruh terhadap penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas tentang inklusi. Menurut Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan berkualitas tinggi. Undang-undang ini menetapkan dasar

kebijakan untuk menyediakan layanan pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi adalah sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua siswa yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk belajar dalam lingkungan pendidikan yang sama dengan siswa lainnya. Pendidikan inklusi ditujukan untuk siswa yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, atau sosial. Dalam kajian Sosiologis, inklusi merupakan proses membangun sosial dengan menerapkan keterbukaan akan keberagaman sosial, ekonomi, dan budaya. Pelaksanaan sistem pendidikan inklusi tidak hanya bertujuan untuk siswa, tetapi juga guru dan sekolah. Tujuan dari pendekatan inklusi; 1) menciptakan iklim pembelajaran demokratis untuk memahami dan menggali karakteristik maupun potensi masing-masing peserta didik; 2) meningkatkan kepercayaan diri dan martabat siswa berkebutuhan khusus; 3) menerima peserta didik dengan beragam kelemahan, kelebihan, serta 4) berusaha secara profesional untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki agar memiliki keberfungsian sosial.



**Gambar 1.** Kegiatan sosialisasi RG habitus bekerjasama dengan PLDPI dan MGMP sosiologi Surakarta

Subjek dari pendidikan inklusi mencakup bidang psikologis dan sosiologis. Pendidikan inklusi dalam perspektif psikologi berarti memberikan pendidikan kepada siswa dengan kelainan atau potensi kecerdasan dan bakat istimewa sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 157 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Luar Biasa mengkategorikan anak yang memerlukan pendidikan khusus menjadi beberapa jenis, meliputi: 1) tunanetra berupa gangguan fungsi penglihatan; 2) tunarungu berupa gangguan fungsi pendengaran; 3) tunagrahita berupa gangguan fungsi kecerdasan intelektual dan adaptasi tingkah laku; 4) tunadaksa berupa gangguan bentuk, keterbatasan gerak pada otot, tulang, dan sendi; 5) tunalaras berupa gangguan dalam mengontrol emosi; 6) hambatan kesulitan belajar (*slow learner*); 7) autisme berupa keterbatasan menyangkut komunikasi, interaksi, dan aktivitas imajinasi; 8) gangguan atau keterbatasan motorik; 9) korban dari kecanduan narkoba, obat-obatan terlarang, serta zat adiktif lainnya; 10) hambatan kelainan lain.



Gambar 2. Pemaparan materi dari narasumber

Karakteristik lain dalam kajian sosial pendekatan inklusi mengenai peserta didik juga ditunjukkan dalam perbedaan sosial, ekonomi, dan budaya dalam proses pendidikan. Seringkali dalam proses pembelajaran, guru menjumpai perbedaan latar belakang budaya peserta didik. Sebagai seorang agen pembelajaran, guru harus tanggap dan merespon perbedaan tersebut, tanpa menimbulkan diskriminasi. Guru merupakan *role model* bagi peserta didik selama mengalami proses pendidikan di sekolah.



Gambar 3. Diskusi dan tanya jawab

Mayoritas penyelenggaraan pendidikan inklusi yang diselenggarakan di Indonesia masih mengalami hambatan. Beberapa diantaranya dirasakan oleh guru yang tergabung dalam MGMP Sosiologi di Surakarta. Pemahaman guru tentang pendidikan inklusi masih minim sehingga implementasinya belum optimal. Secara umum, pemahaman guru hanya sebatas inklusi merupakan pendidikan yang diperuntukkan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK). Dalam penyelenggaraannya, tanggung jawab kemajuan peserta didik, terutama yang berkebutuhan khusus banyak dilimpahkan kepada guru BK maupun wali kelas. Beberapa masih kesulitan merumuskan dan menerapkan kurikulum dikarenakan minimnya keterampilan dan tidak adanya koordinasi dari guru menciptakan strategi pembelajaran di kelas, terutama mengenai metode. Pemberlakuan kurikulum Merdeka tidak diimbangi dengan karakter kualitas guru inklusi. Masih



banyak guru yang belum memiliki kepekaan dan empati terhadap karakteristik peserta didik. Hambatan lain mengenai keterbatasan sarana dan prasarana sebagai penunjang penyelenggaraan sekolah inklusi. Selain itu, kurangnya dukungan dari pihak masyarakat, orang tua, dan Pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi. Sebagian besar masyarakat dan orang tua masih memiliki stigma negatif terkait pendidikan inklusi.

Sebagai bagian dari upaya sekolah menyelenggarakan sistem inklusi, beberapa masalah tersebut adalah yang paling umum. Terjadinya ketimpangan antara kebijakan dan kualitas SDM. Masih banyak penyelenggaraan pendidikan inklusi tidak sesuai dengan yang diamanatkan. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan guru dalam implementasi pendekatan inklusi menjadikan kualitas pembelajaran menjadi kurang maksimal baik perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi. Guru belum mampu menjadi *role model* bagi peserta didik. Keberhasilan capaian peserta didik didasarkan pada substansi materi, bukan proses selama pembelajaran. Sehingga banyak dari *output* pendidikan yang kurang memiliki kepekaan dan empati terhadap keberagaman orang lain. Hal ini tentu bertolak belakang dengan tujuan dari penyelenggaraan pendidikan inklusi dalam Kurikulum Merdeka.

Penyelenggaraan pendidikan inklusi harus terus dikembangkan demi memberikan kesempatan layanan pendidikan yang sama bagi peserta didik tanpa terkecuali. Perlu ada kerjasama dan dukungan dari Pemerintah, sekolah, dan masyarakat untuk mewujudkan pendidikan inklusi, baik dari segi SDM dan fasilitas yang dibutuhkan oleh peserta didik, standarisasi kurikulum, pelatihan secara kontinu bagi guru serta pemenuhan GPK (Guru Pendamping Khusus) dimasing sekolah. Setelah terselesainya sosialisasi sebagai rangkaian kegiatan pengabdian, diharapkan memberikan pengetahuan, pemahaman, serta perubahan pembelajaran Sosiologi inklusif sebagai perwujudan pendidikan multikultural.

Keberlanjutan kegiatan sosialisasi dilanjutkan dengan dengan pembuatan video praktek pembelajaran Sosiologi yang terwakili oleh guru di SMA N 8 Surakarta. Lokasi tersebut dipilih dikarenakan SMA N 8 Surakarta merupakan salah satu sekolah yang ditunjuk oleh pemerintah provinsi sebagai penyelenggara sekolah inklusi. Video pembelajaran meliputi persiapan, pelaksanaan, dan penilaian yang memuat nilai-nilai inklusi. Melalui video tersebut diharapkan menjadi *role model* serta bahan evaluasi bagi guru Sosiologi di sekolah lain dalam implementasi pendidikan inklusi.

## SIMPULAN

Kegiatan pengabdian yang diselenggarakan oleh RG Habitus Pendidikan Sosiologi Antropologi di FKIP UNS bekerjasama dengan PLDPI (Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusi) Surakarta dan MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran Sosiologi) Surakarta telah berlangsung dengan baik dan lancar di SMA Negeri 2 Surakarta. Melalui sosialisasi, guru memperoleh pengetahuan, pemahaman, serta bahan evaluasi mandiri dalam pelaksanaan pembelajaran. Hal ini tercermin melalui produk akhir pengabdian berupa representasi video praktik pembelajaran Sosiologi di SMA Negeri 8 Surakarta. Adanya peningkatan

kemampuan guru memberikan layanan pendidikan inklusif kepada semua siswa: meliputi persiapan, pelaksanaan, serta kegiatan evaluasi. Perlu ada kerjasama dan dukungan dari Pemerintah, sekolah, dan masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan inklusi yang lebih baik lagi, terutama dari segi kurikulum, kualitas SDM, fasilitas, sarana, dan prasarana.

Kemitraan Riset Grup Habitus Program Studi Pendidikan Sosiologi Antropologi FKIP UNS dengan MGMP Sosiologi Surakarta terus berlanjut dengan pengabdian ini. Kegiatan ini dapat dilakukan secara berkelanjutan di masa depan, terutama untuk mendukung kompetensi guru di MGMP Sosiologi Surakarta serta pembahasan mengenai isu-isu pendidikan. Dalam program pembangunan pendidikan, guru berkewajiban mengembangkan kompetensi seiring tanggung jawabnya meningkatkan kualitas belajar siswa. Kegiatan peningkatan profesionalisme diharapkan dapat memotivasi para guru dan menarik mereka untuk berpartisipasi.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Beberapa pihak telah membantu proses pengabdian hingga penyusunan artikel ini, diantaranya: 1) Universitas Sebelas Maret Surakarta melalui LPPM dalam skema dana non APBN yang telah memfasilitasi kegiatan P2M Riset Grup Habitus Prodi Pendidikan Sosiologi Antropologi hingga tersusunnya artikel ini; 2) PLDPI (Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusi) Surakarta yang sudah bersedia menghadirkan narasumber dalam kegiatan pengabdian; 3) Sebagai mitra, MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) Sosiologi Surakarta berpartisipasi aktif dalam kegiatan pengabdian dari awal hingga akhir; 4) Keterlibatan beberapa mahasiswa program Pendidikan Sosiologi Antropologi yang telah memberikan bantuan teknis selama kegiatan berlangsung.

### DAFTAR RUJUKAN

- Afandi, A., Laily, N., Wahyudi, N., Umam, M. H., Kambau, R. A., Rahman, S. A., Sudirman, M., Jamilah, Kadir, N. A., Junaid, S., Nur, S., Ayu, R. D., Parmitasari, Nurdiyana, Wahyudi, J., & Wahid, M. (2022). *Metodologi Pengabdian Masyarakat* (Suwendi, A. Basir, & J. Wahyudi (eds.)). Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI. <https://pendispress.kemenag.go.id/index.php/ppress/catalog/book/19>
- Ardhika, R., & Syaifudin, M. (2023). Analisis Kebijakan Pemerintah Mengenai Sekolah Inklusif. *JIP: Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(8), 7247–7258. <https://doi.org/10.47492/jip.v3i8.2394>
- Azis, F., Mukramin, S., & Risfaisal, R. (2021). Interaksi Sosial Anak Autis di Sekolah Inklusi (Studi Sosiologi Pada Sekolah Inklusi di Kota Makassar). *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 9(1), 77–85. <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v9i1.4365>
- Ita, E. (2019). Konsep Sistem Layanan Penyelenggaraan Pendidikan Melalui Pendidikan Inklusif Bagi Anak Berkebutuhan Khusus. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Citra Bakti*, 6(2), 186–195.



- <https://doi.org/10.5281/zenodo.3551972>
- Mansur, H. (2022). Pendekatan Pembelajaran Contextual Teaching and Learning dalam Setting Kelas Inklusi (Artikel Studi Literatur Implementasi Pembelajaran Contextual Teaching and Learning di SD Inklusi) 1. *Journal of Instructional Technology*, 3(1), 35-40. <https://doi.org/10.20527/j-instech.v3i1.7921>
- Prijowuntato, S. W., Suratno, I. B., & Astuti, C. W. R. (2023). Penguatan Pembelajaran Berbasis PJB dan PBL pada Guru-Guru di Yayasan Insan Mandiri Denpasar. *Share: Journal of Service Learning*, 9(1), 1-6. <https://doi.org/10.9744/share.9.1.1-6>
- Pudyastuti, S. G. (2023a). *Parenting Education Sebagai Strategi Komunikasi Penerimaan Orang Tua ABK di PLDPI Surakarta*. 10, 100-110.
- Pudyastuti, S. G. (2023b). Pendampingan Penelitian dan Publikasi Ilmiah bagi Guru Ilmu Pengetahuan Sosial MAN 2 Surakarta. *JCES Journal of Character Education Society*, 6(1), 230-238. <https://doi.org/10.31764/jces.v6i1.11977>
- Suwartini, S. (2018). Implementasi Pendidikan Karakter Inklusi pada Anak Berkebutuhan Khusus. *Prosiding Konferensi Ilmiah Dasar: Membumikan Pendidikan Karakter Dengan Pendekatan Inklusi*, 1(1), 1-10. <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/KID/article/view/442>
- Tanjung, R., Supriani, Y., Arifudin, O., & Ulfah, U. (2022). Manajemen Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi pada Lembaga Pendidikan Islam. *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(1), 339-348. <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i1.419>
- Wardhani, P. S. N. (2018). Pelaksanaan Pendidikan Multikultural Dalam Upaya Membangun Keberagaman Dan Meningkatkan Persatuan Bangsa Di Sekolah Inklusi. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 8(1), 1-13. <https://doi.org/10.20527/kewarganegaraan.v8i1.4313>
- Widyan, M., Sulistyarini, & Budjang, G. (2014). Kompetensi Sosial Guru Mata Pelajaran Sosiologi dalam Bersikap Inklusif di Kelas XI IPS 1 Madrasah Aliyah Negeri 2 Pontianak. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa (JPPK)*, 3(8), 1-23. <https://doi.org/10.26418/jppk.v3i8.6612>